

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007

Bumi Beli Saham Newmont

US\$ 109 Juta

JAKARTA – PT Bumi Resources Tbk bakal melebarkan usahanya dari tambang energi ke metal dengan membeli 3% saham PT Newmont Nusa Tenggara senilai US\$ 109 juta. Perusahaan yang diincar Bumi itu bergerak di bidang pertambangan metal khususnya tembaga, emas, dan perak.

“Kami akan menyesuaikan jadwal yang disepakati pemerintah dengan Newmont untuk melakukan transaksi tersebut,” ungkap Direktur Bumi Resources Eddie J Soebari kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (22/3).

Menurut dia, perseroan sudah memiliki alternatif pendanaan untuk membiayai transaksi tersebut yakni dari kas internal dan pinjaman pihak ketiga. Namun demikian, dia belum bersedia merinci kapan hal itu direalisasikan.

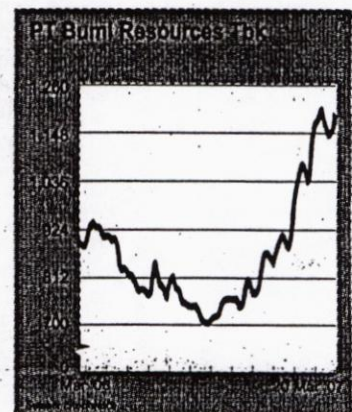
Eddie menambahkan, Bumi menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sumbawa pada 16 Maret 2007.

Selain itu, perseroan bersama

perusahaan milik Pemprov NTB, PT Gerbang E-Max, dan Pemkab Sumbawa sepakat membentuk perusahaan patungan atau *joint venture*. “Perusahaan patungan itu kemudian membeli 3% saham yang diinvestasi Newmont Nusa Tenggara. Jumlah 3% itu sesuai dengan program divestasi Newmont dan memperhatikan seluruh peraturan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan kepada Bursa Efek Surabaya (BES), Rabu (21/3).

Menurut dia, Bumi akan menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan patungan dengan pemerintah daerah tersebut. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban pada *joint venture* tersebut akan ditentukan kemudian.

Secara terpisah, pengamat pasar modal dari PT Kuo Capital Arief Sa-



gita menilai, langkah Bumi membeli 3% saham Newmont merupakan sebuah terobosan yang positif. “Ini merupakan upaya diversifikasi usaha dari tambang energi ke metal,” jelas dia kepada *Investor Daily*.

Pasalnya, lanjut dia, perseroan sebelumnya dikabarkan menjajaki akuisisi pertambangan bijih besi di daerah Afrika Selatan. Namun, kabar tersebut sejauh ini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari manajemen Bumi.

Menurut Arief, pertambangan bijih besi memungkinkan untuk disinergikan dengan pabrik baja milik perseroan. Langkah ini cukup ideal.

Bila Bumi berhasil membeli saham-saham pertambangan metal tersebut, kata dia, perusahaan berpeluang meraih keuntungan yang sangat besar, memanfaatkan momentum menguatnya harga komoditas metal belakangan ini.

Meski demikian, Arief berpendapat, langkah perseroan membeli saham perusahaan pertambangan metal patut dipertanyakan karena selama ini fokus perseroan hanya pada penambangan energi terutama batu bara.

Alasannya, secara historis, di dunia ini tak ada perusahaan penambangan yang bisa menguasai kedua komoditas, yakni energi dan metal. Selain itu, investasi yang dibutuhkan pada bisnis di pertambangan sangat mahal.

Sementara itu, Arief mengatakan, pergerakan saham Bumi bursa masih dalam batas yang wajar pada kisaran Rp 1.200-1.300 per saham. Jika terjadi koreksi harga hingga di

bawah level itu, umumnya terpengaruh sentimen negatif dari grup.

Pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Jakarta, kemarin, saham perseroan berakhir stagnan di level Rp 1.240 per saham. Volume saham yang berpindah tangan mencapai 35,10 juta unit senilai Rp 43,43 miliar. Sedangkan frekuensi transaksi sebanyak 218 kali.

Pemenang KPC

Bumi Resources pada 30 Maret 2007 akan mengumumkan perusahaan yang berhak memiliki 30% saham di kedua anak perusahaannya yakni, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

Eddie dalam keterangan kepada BEJ kemarin menjelaskan, pemilihan calon pembeli saham KPC dan Arutmin memasuki proses seleksi tahap kedua. Perusahaan calon pembeli yang masuk dalam tahap kedua ini mencapai enam perusahaan, semuanya dari manca negara.

Mereka tengah menyelesaikan proses *due diligence* (uji tuntas) setelah memasukkan penawaran (*bidding bids*) pada 28 Februari 2007. (rad)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : 22											TAHUN 2007

Melawan Ganasnya Semburan Lumpur Lapindo

Untaian bolton yang dimasukkan ke kawah dilengkapi benang ukur dan alat sensor tekanan.

Berhentinya semburan lumpur Lapindo selama setengah jam pada Senin (19/3) lalu masih menyisakan pertanyaan panjang. Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (TPSLS) maupun Tim Inseri Bola Beton (bolton) ITB yang bertugas mengatasi lumpur pun sempat bertanya-tanya.

Lalu, apakah berhentinya semburan lumpur itu karena teknologi bolton yang diterapkan? Hingga kini, para pakar itu tak secara jelas menyebutkan penyebab berhentinya semburan lumpur. Bahkan, mereka pun belum berani menyatakan terus terang bahwa berhentinya semburan lumpur merupakan dampak dari metode bolton yang telah dilakukan.

Meski begitu, mereka mengakui metode bola beton menunjukkan tren positif. Tren itu diketahui dari perubahan-perubahan yang tampak di permukaan pusat semburan lumpur. Timnas pun memastikan melanjutkan metode dari tim pakar ITB itu.

Teknik penyumbatan dengan metode *high density chained ball* (HDCB) itu dimulai dengan memasukkan untai bolton ke kawah lumpur menggunakan kawat baja sling untuk mengerek untai bolton. Kondisi kawat baja ini harus kuat agar tak terputus sehingga menyebabkanagalnya insersi.

Prosesnya, masing-masing untai bola beton dimasukkan satu persatu dengan selang waktu. Untaian bolton yang dimasukkan ke kawah dilengkapi benang ukur dan alat

sensor tekanan. Setelah diukur, untai bolton itu bisa tenggelam sampai kedalaman 700 meter.

Juru bicara Timnas PLS Rudi Novrianto mengatakan, keberhasilan teknik itu harus diawali dengan tenggelamnya untai bola beton ke dasar kawah semburan. Setiap untai terdiri atas dua bola besar dan dua bola kecil. Bola besar masing-masing berdiameter 40 sentimeter. Berat setiap bola besar adalah 40 kilogram. Sedangkan bola yang kecil, masing-masing berdiameter 20 cm dengan berat 16 kilogram hingga 17 kilogram.

Jika ditotal, berat setiap untai bola beton tersebut 112 kilogram sampai 114 kilogram. Sempat dikawatirkan untai bola beton itu tak dapat tenggelam ke dasar kawah karena kuatnya tekanan semburan. Pelaksanaan teknik bolton senilai Rp 3 miliar itu berpotensi gagal. Potensi kegagalan yang utama, jika untai bola beton tidak tenggelam ke dasar kawah. Potensi kegagalan berikutnya, jika untai bola beton tidak masuk tepat ke lubang kawah lumpur. Sehingga, setiap untai bola beton dilengkapi alat sensor tekanan.

Alat tersebut berfungsi mengetahui posisi HDCB di dalam kawah, serta berfungsi memberikan gambaran tentang geometri dasar kawah. Bila tahap itu berhasil dilaksanakan, baru dimasukkan kembali untai-untai berikutnya secara bertahap.

Sebelum memasukkan untai bola beton ke dalam kawah, petugas insersi menyurvei posisi kawah dengan menggunakan sonar. Peralatan sonar tersebut dipasang pada kawat sling yang dibentangkan antara dua tower crane di tepi barat dan timur kawah lumpur. "Untuk mengetahui posisi kawah, sonar itu digerakkan ke barat dan timur, persis cara kerja scanner," jelas Rudi.

Untuk memulai insersi harus

memperhitungkan cuaca. Bila angin kencang berembus di sekitar kawah lumpur, maka batal dilakukan. Karena, posisi tower crane tidak boleh labil. Selain itu, cuaca yang tidak baik, seperti hujan juga berpengaruh terhadap insersi bolton. "Begitu hujan reda, tim insersi segera memulai proses memasukkan bola beton ke dalam kawah," tambahnya.

Timnas PLS menyatakan bahwa mereka telah memesan lagi 500 untai bola beton. "Itu kami putuskan setelah melihat tren positif di sekitar pusat semburan," ungkapnya. Meski volume semburan belum bisa dihitung secara pasti, namun metode bola beton telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tanda itu terlihat dari peningkatan gas H₂S dan penampakan luar permukaan semburan.

Menurut dia, peningkatan H₂S terjadi karena tekanan lumpur dalam pusat semburan mulai turun. Aliran lumpur yang akan menyembur sudah dihambat. Yang paling banyak keluar ke permukaan adalah gas. "Karena itu, wajar tak ditemui lagi letupan-letupan lumpur di pusat semburan. Ini yang cukup menggembarakan," ujarnya.

Kondisi di lapangan menunjukkan, kepulan asap dari pusat semburan terlihat sangat tebal. Kepulan yang mengandung gas H₂S dengan konsentrasi tinggi itu beberapa kali mengganggu proses insersi.

Hingga pekan lalu, pemasukan bola beton tahap pertama sudah mencapai 374 untai. Timnas juga telah memesan lagi 500 untai bola beton ke PT Wika Beton, Pasuruan, dan PT Pasific Prestrees Indonesia (PPI), Porong. Pemesanan akan berhenti hingga volume semburan turun seperti yang diharapkan, yaitu semburannya berkurang hingga 70 persen. Pemesanan bolton kali ini dilapisi dengan abu sisa pembakaran batu bara PLTU

Paiton.

Sampai berapa lama usaha menurangi semburan lumpur ini dilakukan? Dia menegaskan, Timnas PLS akan menghentikan pemasukan bola beton, jika sudah berdampak signifikan. "Jika sebelum 500 untai bola beton selesai dimasukkan semua, sudah berdampak signifikan, ya berhenti. Tapi, jika masih kurang juga, ya ditambah bola beton yang dimasukkan," katanya.

Inseri bolton pada tahap pertama, satu hari bisa dimasukkan sebanyak 54 untai bola beton dan waktu yang dibutuhkan selama 10 menit per untai. Untuk tahap kedua, waktu yang dibutuhkan untuk 500 untai bola beton diperkirakan selama 10 hari selesai. Ini dengan catatan, jika dalam sehari bisa memasukkan sebanyak 50 hingga 75 untai. Kemungkinan lain, insersi bola beton juga akan dihentikan jika muncul tren negatif. Sehingga, Timnas maupun Tim Inseri Bolton ITB terus memantau saat insersi berlangsung. ■ tok

Ikhtisar

- Setiap untai terdiri atas dua bola besar dan dua bola kecil. Bola besar berdiameter 40 sentimeter dan berat 40 kilogram. Sedangkan bola kecil berdiameter 20 cm dengan berat 16 kilogram hingga 17 kilogram.
- Peningkatan volume H₂S yang keluar terjadi karena tekanan lumpur dalam pusat semburan mulai turun.
- Hingga pekan lalu, pemasukan bola beton tahap pertama sudah mencapai 374 untai. Timnas juga telah memesan lagi 500 untai bola beton.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13 .

TAHUN 2007

Penjualan Medco Brantas Bisa Batal

JAKARTA — Transaksi penjualan Medco Brantas kepada Prakarsa Group bisa tidak diizinkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Kepala Biro Penilaian Keuangan Sektor Riil Bapepam LK, Nurhaida, mengatakan jika dalam arbitrase Medco perlu bertanggung jawab atas kerugian masyarakat maka kelayakan Prakarsa Group perlu diteliti lebih lanjut.

"Apakah Medco ada tanggung jawabnya dalam kerugian masyarakat? Itu yang membedakan mereka boleh melakukan transaksi ini atau tidak," kata Nurhaida di kantornya, Jakarta, Kamis (22/3).

Harga jual kepemilikan Medco di Lapindo, juga akan ditelaah oleh Bapepam. Menurut Nurhaida, perlu dilihat lebih lanjut apakah harga jual memang sesuai dengan nilai aset Medco Brantas saat ini.

Ia mengatakan sepertinya nilai bukunya lebih besar sehingga Bapepam perlu memeriksa lebih lanjut apakah ada penilai independen yang menilai aset Medco Brantas tersebut. Sebagai perusahaan terbuka, jika transaksi itu melebihi 10 persen pendapatan ataupun 20 persen dari ekuitas maka perlu izin pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham.

**Jelas,
kami akan
bersikap adil.**

Nurhaida

Kepala Biro Bapepam LK

PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak usahanya Medco Brantas di melepas 32 persen sahamnya di Lapindo Brantas Inc kepada Prakarsa Group dengan nilai kurang dari Rp 1 juta, atau hanya 100 dolar AS (Rp 920 ribu). Sekretaris Perusahaan Medco Energi, Andy Karamoy, mengatakan transaksi penjualan kepemilikan Medco di Lapindo itu dilakukan pada 16 Maret 2007.

Gugatan Medco atas pemilik saham Lapindo lainnya yaitu Energi Mega Persada saat ini kabarnya masih bergulir di arbitrase internasional. Medco merasa telah memperingatkan penggunaan *chasing* dalam pengeboran sumur Banjar Panji-1 yang saat ini bermasalah.

Dalam Laporan Medco Energi ke Bapepam disebutkan, Minarak Labuan memberikan jaminan keuangan atas Prakarsa Group. Minarak Labuan diketahui masih berada satu payung dengan Grup Bakrie.

Pengamat pasar modal Edwin Sinaga, meminta Bapepam memberikan perlakuan yang sama terhadap persoalan divestasi itu. "Jangan sampai ada yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Bapepam," kata Edwin.

Bapepam berjanji akan memberikan perlakuan yang sama atas para pemilik Lapindo. "Kita akan melakukan *equal treatment*, baik kepada Energi Mega Persada atau Medco," Nurhaida menegaskan. ■ una

66

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2007

SOAL DIVESTASI LAPINDO

Medco dan Energi Diperlakukan Sama

JAKARTA – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menerapkan kebijakan yang sama (*equal treatment*) antara rencana divestasi PT Medco Energi Internasional Tbk dan PT Energi Mega Persada Tbk pada Lapindo Brantas Inc.

Energi akhirnya menggagalkan *spin off* 50% saham pada Lapindo. Pembatalan itu terkait dengan tanggung jawab Energi atas ganti rugi akibat musibah luapan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo.

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riel Bapepam-LK Nurhaida menjelaskan, regulator pasar modal akan meneliti apakah transaksi itu sama dengan rencana divestasi saham Energi yang ditolak Bapepam beberapa waktu lalu.

“Kalau konteksnya persis sama, tentu kami akan menerapkan perlakuan sama. Kalau ada perbedaan, kami tentu juga akan melihat hal yang membedakan itu. Hal ini yang sedang diteliti,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/3).

Medco mengumumkan divestasi seluruh sahamnya pada PT Medco E&P Brantas kepada Grup Prakarsa senilai US\$ 100 juta pada 16 Maret 2007. Alasannya, perseroan berniat mengalokasikan sumber daya aset yang dimiliki itu untuk investasi yang lebih menarik.

Bapepam hingga kini belum bisa memastikan transaksi saham

itu mirip dengan divestasi Energi pada Lapindo meski peraturan yang digunakan dalam transaksi itu sama dengan rencana divestasi Energi yang gagal tahun lalu.

Nurhaida menjelaskan, beberapa hal yang diteliti menyangkut harga wajar saham yang dijual senilai US\$ 100. Perlu ada penilai independen yang mengevaluasi nilai aset tersebut walaupun Medco menilai transaksi tersebut tidak termasuk benturan kepentingan.

Otoritas pasar modal juga akan menelisik Grup Prakarsa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh tanggung jawab dan kewa-

67

akan mengeluarkan dana hingga US\$ 70 juta guna menanggung kerusakan akibat luapan lumpur.

"Jumlah tersebut sama dengan nilai buku MB. Karena itu, MB kemungkinan bisa dilikuidasi, kecuali jika luapan lumpur segera bisa dihentikan," kata dia dalam riset tersebut.

Hingga akhir September 2006, MB membukukan akselerasi depresiasi US\$ 22,3 juta, sehingga mengakibatkan rugi bersih US\$ 17 juta dan secara konsolidasi kerugian US\$ 8 juta dari penyertaan pada Lapindo Brantas Inc.

Kejadian terburuk bisa terjadi karena berdasarkan estimasi Energi diperlukan dana sampai US\$ 180 juta untuk merehabilitasi area dan biaya lain.

ajiban Medco E&P. Menurut dia, Bapepam perlu melihat kesiapan perusahaan itu membayar kewajiban Medco E&P terkait musibah Lapindo sesuai dengan porsi sahamnya.

Dia menjelaskan, otoritas pasar modal berniat menanyakan lebih jauh tentang kelanjutan arbitrase Medco dengan Energi setelah transaksi rampung.

Kontribusi pendapatan terbesar Medco masih berasal dari penjualan minyak dan gas, sedangkan porsi dari usaha patungan merugi pada September 2006 akibat akselerasi depresiasi Medco E&P Brantas



Sumber: Danareksa

"Kami masih meneliti divestasi saham itu, sehingga kami belum bisa menyimpulkan lebih jauh atas tanggapan Bapepam," ujarnya.

Akselerasi Depresiasi

Danareksa dalam kajian tentang Medco pertengahan November 2006 menyatakan kemungkinan likuidasi Medco E&P Brantas (MB). Peralannya, estimasi penggantian kerugian akibat luapan lumpur di Sumur Banjarpanji-1 Sidoarjo yang ditanggung perseroan bisa melebihi nilai buku sebesar US\$ 70 juta. MB memiliki 32% *working interest* pada Blok Brantas.

Analisis Danareksa Bonny Setiawan menjelaskan, perusahaan

Menurut Bonny, Medco harus mengeluarkan dana cadangan (*cash call*) sekitar US\$ 58 juta atau lebih besar dari estimasi Danareksa sebelumnya US\$ 32 juta.

Di luar hasil gugatan arbitrase terhadap Energi, analisis tersebut mengasumsikan, pencadangan kerugian sekitar US\$ 32 juta. Dengan mengesampingkan dana provisi, laba bersih inti diperkirakan mencapai US\$ 89 juta.

Bila MB dilikuidasi pada 2007, tulis Bonny, Medco membukukan kerugian lagi US\$ 40 juta dari kerusakan aset, sehingga memangkas proyeksi laba bersih 2007 sekitar 60% menjadi US\$ 43 juta. (*hut/mu*)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A.8

TAHUN 2007

BIN Ikut Desak Lapindo

Anggota Panitia Khusus
DPRD kecewa terhadap
Menteri Purnomo.

SURABAYA — Badan Intelijen Negara (BIN) diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masuk tim negosiator dalam perjuangan korban lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, mendapatkan ganti rugi.

Menurut Ketua Pengarah Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Purnomo Yusgiantoro, Presiden menugasi langsung Kepala BIN Syamsir Siregar masuk tim negosiator.

Purnomo yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengatakan hal tersebut kepada wartawan di Surabaya sebelum berdialog dengan Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur kemarin.

Dialog berlangsung di Gedung Negara Grahadi, yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, perwakilan korban lumpur, Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso.

"Presiden yang menunjuk langsung Kepala BIN Pak Syamsir untuk ikut memperjuangkan aspirasi korban lumpur mendapatkan ganti rugi *cash and carry*," kata Purnomo.

Syamsir, yang hadir dalam pertemuan, tidak menjawab pertanyaan wartawan ihwal keterlibatan lembaga intelijen dalam penanganan korban lumpur Lapindo. Dia hanya berkomentar singkat mendoakan agar masalah yang menimpa warga Porong segera teratasi. "Mudah-mudahan saja tidak ada masalah," katanya.

Purnomo menjelaskan saat ini pemerintah masih mempertahankan penyelesaian model relokasi

68



Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera Sidoarjo, unjuk rasa di depan Gedung Grahadl, Surabaya, kemarin.

plus untuk warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I. Sedangkan warga perumahan menuntut ganti rugi seperti yang dijanjikan kepada warga empat desa, yaitu Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo.

Ganti rugi tersebut untuk tanah pekarangan Rp 1 juta per meter persegi, bangunan rumah Rp 1,5 juta per meter persegi, dan persawahan Rp 120 ribu per meter persegi.

Menteri Purnomo memahami keinginan warga untuk mendapatkan ganti rugi tunai. Dia berjanji terus berjuang bersama Tim Nasional dan Gubernur Imam Utomo, yang dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden.

Suasana dialog sempat diwarnai aksi *walk out* Sekretaris Panitia Khusus Lumpur DPRD Jawa Timur Muhammad Mirdasy. Dia meninggalkan arena pertemuan setelah mengikuti pertemuan selama 15 menit.

Mirdasy keluar dari forum dialog karena kecewa terhadap Purnomo yang hadir atas nama Ketua Pengarah Tim Nasional, bukan sebagai utusan Presiden. "Karena

bukan utusan Presiden, dia tidak bisa mengambil keputusan. Saya sangat kecewa. Pertemuan ini tidak banyak manfaatnya," kata Mirdasy. ● SUNUDIANTORO | KUKUH SW

BERKONVOI SEJAUH 40 KILOMETER

Sekitar seribu orang korban lumpur Lapindo mendatangi kantor DPRD Jawa Timur kemarin. Warga menagih janji penyelesaian ganti rugi secara tunai atas tanah dan rumah mereka yang terendam lumpur.

Massa berangkat dari lokasi pengungsian Pasar Baru Porong dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor dan mobil. Mereka menyusuri Jalan Raya Porong hingga Kota Surabaya yang berjarak sekitar 40 kilometer.

Meski ratusan aparat mengawal konvoi itu, jalur masuk Surabaya tetap macet total. Semua kendaraan dari Malang dan Banyuwangi terpaksa dialihkan untuk memutar melalui Mojok-

erto. "Pengawasan untuk menjaga agar massa tidak anarkistis saat berhenti. Kami juga menghalau mereka agar tidak memblokir jalan," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Andi Yudianto.

Warga yang berkonvoi berasal dari tiga desa, yaitu Ketapang, Kedungbendo, dan Renokenongo, serta dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera. Warga merupakan korban lumpur Lapindo pascaledakan pipa gas Pertamina, yang saat ini belum mendapatkan kejelasan soal ganti rugi yang akan mereka terima.

● ROHMAN TAUFIQ

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 1		TAHUN 2007

Lumpur Lapindo

Semburan Sulit Diprediksi Kapan Berakhir

Bandung—Meski ada upaya menghentikan arus semburan dengan memasukkan ratusan bola-bola beton, para pakar geologi tetap menyebutkan luapan lumpur panas di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, adalah *mud volcano* yang sulit diprediksi kapan semburannya akan berakhir. Sementara itu, warga Perumtas-1 yang menjadi korban lumpur terus menekan agar memperoleh ganti rugi berupa *cash and carry*.

Rabu (21/3) petang, warga melancarkan aksi cap jempol darah sebagai simbol perjuangan mereka hingga titik darah penghabisan. Aksi ini akan berlanjut hingga menjelang mereka melancarkan aksi ke Jakarta.

Rencana ke Jakarta ditunda karena Kamis (22/3) petang ini berlangsung pertemuan antara Pansus Lumpur DPRD Jatim bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, yang juga Ketua Tim Pengarah Timnas Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.

"Kalau hasil pertemuan nanti masih belum menyetujui tuntutan

warga, surat pernyataan cap jempol darah ini akan kami serahkan pada Presiden," kata Sumitro, salah seorang perwakilan warga Perumtas-1. Cap jempol darah dilakukan di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong, dengan menggunakan jarum jahit.

Salah satu pakar hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Lambok M. Hutasoit, tidak sepakat dengan perkiraan lumpur panas Lapindo akan berhenti dengan sendirinya dalam 30 tahun mendatang. Kepada SH di Bandung, Rabu (21/3), Lambok mengatakan lumpur panas Lapindo kandungannya merupakan fluida. Dengan demikian, alirannya tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Ini berbeda jika kandungan yang keluar merupakan bahan tambang seperti emas, yang dapat dipastikan dalam berapa tahun cadangan emasnya akan habis. Menurut Lambok yang juga Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Jawa Barat itu, *mud volcano* juga membawa dampak bagi lingkungan sekitar, yaitu selain

anjloknya lapisan tanah, juga tercemarnya air tanah.

Lambok menyebutkan ledakan pipa gas Pertamina di Porong merupakan contoh telah terjadinya penurunan lapisan tanah di sekitarnya. Selain itu, tekanan lumpur bercampur air cukup kuat hingga menggerus lapisan tanah. Lapisan tanah yang bercampur air dan lumpur itu akhirnya ikut menyembur ke permukaan, dan hilangnya lapisan tanah menyebabkan terjadinya anjlok.

Menurut hasil penelitian, air tanah di sekitar titik lumpur juga telah tercemar sehingga tidak laik untuk dikonsumsi. "Airnya menjadi kotor dan asin," jelas Lambok. Air tanah yang tercemar itu berada di area yang berdekatan dengan wilayah yang terendam lumpur.

Lambok juga mengungkapkan semburan lumpur yang sempat berhenti sekitar 30 menit beberapa hari lalu tidak berarti bahwa upaya memasukkan bola beton ke pusat semburan telah berhasil.

Ke hal.11, SEMBURAN

Semburan

Sebaliknya, justru di-kawatirkan bola beton akan membuat munculnya titik semburan baru di tempat lain. Sebelum disumbat, bola beton memang telah ada titik semburan baru kendati lebih kecil, tapi tidak tertutup kemungkinan titik semburan baru tersebut kemudian membesar.

Ia menilai penanganan lumpur Lapindo tidak tepat sejak awal, karena seharusnya dilakukan metode geofisika. Artinya, terlebih dahulu dicari pusat aliran air dan lumpurnya. Yang terjadi saat ini, pusat aliran air belum diketahui sehingga yang disumbat dengan bola beton bukanlah pusat aliran air.

Air bercampur lumpur akan terus mengalir dengan

tekanan yang tetap kuat apabila pusat aliran air tetap dibiarkan. Hal inilah yang terjadi sampai sekarang ini.

Tiga Desa

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso membantah pihaknya tidak memperhatikan warga Desa Ketapang, Kelitengah, dan Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, yang kini ikut menjadi korban lumpur Lapindo Brantas Inc. Pada prinsipnya, seluruh korban lumpur akan mendapatkan ganti rugi, apalagi kondisi faktual di lapangan menunjukkan rumah-rumah mereka memang dibanjiri lumpur. Konsentrasi menyelesaikan Perumtas-1, karena lokasi perumahan memiliki sertifikat dan hitung-hitungannya mudah.

Sebanyak 1.100 rumah di

Desa Ketapang, Kelitengah, dan Gempolsari sempat dibanjiri lumpur, ditambah lagi puluhan hektare sawah warga ikut tenggelam. Meski akhirnya lumpur sempat surut, tetapi sebagian rumah tidak bisa ditempati lagi. Selain karena sudah kemasukan lumpur yang cukup tinggi, rumah juga penuh dengan tanah urukan, khususnya di depan tanggul.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo memastikan siswa SD, SMP, dan SMA/SMK korban lumpur yang tinggal di lokasi pengungsian yang akan mengikuti Ujian Nasional (Unas) akan ditampung di sekolah-sekolah yang sepadan. Tetapi para siswa tersebut tidak akan mendapatkan dispensasi atas nilai Unas.

(didit ernanto/chusunun hadi)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23	24 25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : 15											TAHUN 2007

Menteri ESDM Desak Lapindo

Lapindo Brantas Akan Beri Ganti Rugi walaupun Tanpa Sertifikat

SURABAYA, KOMPAS – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiantoro mendesak Lapindo Brantas Inc memberikan ganti rugi kepada warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 dan desa sekitarnya yang terendam lumpur panas. Ini untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan rasa keadilan.

Penegasan itu disampaikan sesuai pertemuan tertutup Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Pansus DPRD Jawa Timur, dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (22/3) malam.

Hadir pula Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso.

Menjelang pertemuan, sekitar 3.000 warga yang berkonvoi dengan sepeda motor berunjuk rasa di depan Gedung Grahadi dan

DPRD Jatim. Mereka mendesak bertemu langsung dengan Purnomo. Akhirnya, sebanyak 12 wakil pengunjuk rasa ikut pertemuan.

Purnomo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan dirinya dan Kepala Badan Intelijen Negara membahas ganti rugi dengan Lapindo Brantas Inc.

Sumitro, seorang wakil warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1, menyatakan tidak puas karena itu baru janji. Tidak ada tenggat kapan warga mendapatkan keputusan.

Sementara itu, PT Minarak Lapindo Jaya, yang ditunjuk La-

pindo Brantas untuk memberikan ganti rugi kepada warga, menyatakan bersedia memberikan ganti rugi tanah dan bangunan yang terendam lumpur panas meski tanpa sertifikat tanah. Ganti rugi diberikan jika ada dokumen Petok D atau Letter C.

Ganti rugi akan dibayar 20 persen lebih dulu dengan jaminan dari Bupati Sidoarjo bahwa tanah itu bisa disertifikatkan.

"Jika sudah ada sertifikat, baru kekurangannya akan dilunasi," kata Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla di Hotel Shangri-La, Surabaya.

Bupati Sidoarjo mendesak pemerintah pusat mengeluarkan payung hukum, jual beli tanah dengan bukti Petok D atau Letter C sudah sah, tidak perlu sertifikat tanah.

Di Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lewat sidang paripurna menyepakati pembentukan panitia khusus soal semburan lumpur panas Lapindo.

Dalam pernyataan yang ditandatangani anggota DPD Jawa Timur, yaitu Mujib Imron, Mardjito GA, Nuruddin A Rahman, dan Mahmud Ali Zain, pemerintah diminta menalangi ganti rugi, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat semburan lumpur Lapindo.

(APA/LAS/DIK)



UNJUK RASA WARGA PERUMTAS – Ribuan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Sidoarjo, berunjuk rasa di depan Gedung Graha, Surabaya, Kamis (22/3). Aksi tersebut bersamaan dengan pertemuan tertutup Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dengan Pimpinan Muspida Jatim dan Pansus Lumpur Panas DPRD Jatim yang membahas penanganan korban lumpur panas Lapindo. Warga Perumtas tetap menuntut ganti rugi atas ribuan rumah mereka yang terendam.

Investor Daily/ANTARA/Éric treng/Kozhuz/07

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15						16 17 18 19 20 21 22		23	24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 12											TAHUN 2007

Lapindo Siap Bayar Ganti Rugi

Asal Ada Jaminan Bupati

SURABAYA (Media): PT Minarak Lapindo Jaya siap membayar ganti rugi tanah, bangunan, dan lahan sawah warga empat desa yang terkubur lumpur panas. Syaratnya ada jaminan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur.

"Selama ini muncul polemik soal pembayaran ganti rugi, tapi kini kita memberikan solusi terbaik agar proses pembayaran ganti rugi tidak membebani warga," kata Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala kepada wartawan di Surabaya, kemarin.

PT Lapindo Brantas Inc menyepakati hanya membayar ganti rugi kepada warga empat desa di Kecamatan Porong yang terkena dampak langsung luapan lumpur panas. Keempat desa itu ialah Renokenongo, Siring, Kedung Bendo, dan Jatirejo.

Menurut Andi, polemik itu muncul lantaran banyak warga yang tidak memiliki sertifikat, izin mendirikan bangunan (IMB), dan surat kelengkapan lainnya.

Untuk mempermudah pembayaran, lanjut Andi, Lapindo memberlakukan syarat khusus. Warga yang tidak memiliki IMB bisa mengganti-

nya dengan surat pernyataan jaminan bupati tentang luas bangunan.

Jika punya sertifikat, warga yang mengajukan ganti rugi haruslah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertifikat.

Namun, kata Andi, bila nama yang mengajukan berbeda dengan yang tercantum di sertifikat, PT Minarak Lapindo Jaya mensyaratkan adanya jaminan dari pemerintah kabupaten, surat kuasa dan atau surat keterangan ahli waris.

"Ini untuk membuktikan tanah yang diperjualbelikan tidak dalam sengketa. Kalau sudah lengkap, kita siap memberikan ganti rugi uang muka 20%."

Bagaimana dengan warga yang hanya memiliki petok D dan leter C? Andi menjelaskan, warga yang memiliki dua alat bukti itu perlu melengkapinya dengan surat pernyataan jaminan bupati bahwa ukuran

persil tanah dan bangunan benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat itu. Juga ada jaminan bahwa tanah itu tidak dalam sengketa.

"Dengan adanya surat jaminan bupati, setelah melalui verifikasi dokumentasi sempurna, maka ikatan jual beli di depan notaris dapat dilaksanakan dan pembayaran uang muka 20% akan segera dibayarkan."

Setelah seluruh proses pembayaran uang muka selesai bagi warga yang memiliki kelengkapan, sisanya 80% akan dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa kontrak rumah warga korban luapan lumpur panas itu habis.

"Warga tidak perlu khawatir. Sisanya tetap akan dibayar penuh, tidak melalui beberapa tahap."

Menurut Andi, penerapan persyaratan itu untuk memberikan jaminan kepastian hak dan hukum bagi masing-masing pihak di kemudian hari.

PT Minarak Lapindo Jaya siap membayar ganti rugi terhadap 67 bidang sawah dari 51 pemilik yang te-

lah melalui proses verifikasi. Pembayaran diharapkan selesai pada Minggu depan.

Untuk kepentingan pembayaran ganti rugi, PT Lapindo Brantas telah menyiapkan dana sebesar Rp2,5 triliun sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

Sementara itu, upaya tim insersi memasukkan bola beton tahap kedua sebanyak 500 untai hingga kemarin sore belum bisa dilakukan karena hambatan cuaca. Persiapan di lapangan sebenarnya sudah dilakukan. Derek untuk mengangkut dan memasukkan bola beton ke pusat semburan belum bisa bekerja.

Bola beton tahap kedua yang sudah tiba di lokasi juga belum ada penambahan, masih tetap 23 untai. Bola itu didatangkan empat hari lalu dan semula direncanakan mulai dimasukkan ke pusat semburan tiga hari lalu. Namun, kendala cuaca menjadi penyebab utama tertundanya pemasukan bola beton. (FL/HS/X-11)

'Warga tidak perlu khawatir. Sisanya tetap akan dibayar penuh, tidak melalui beberapa tahap.'

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15 -

TAHUN 2007

DIVESTASI LAPINDO

**Bapepam
Harus Waspadai
Transaksi Medco**

JAKARTA (Media): Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) harus meminta kejelasan penjualan blok Brantas (Lapindo Brantas) yang dilakukan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco) kepada grup PT Prakarsa seharga US\$100.

"Perjanjian jual beli antara Medco dan Prakarsa itu harus jelas dan pertanggungjawabannya terhadap permasalahan lumpur Lapindo juga harus jelas. Kalau perjanjiannya tidak jelas, Bapepam harus menolak penjualan yang dilakukan oleh Medco," kata pengamat pasar modal Edwin Sinaga di Jakarta, kemarin.

Menurut Edwin, hal tersebut harus dilakukan Bapepam karena sebelumnya Energi Mega Persada permohonan divestasinya juga ditolak. Untuk itu, Bapepam juga harus menerapkan standar yang sama terhadap Medco.

"Bapepam harus meminta perincian mengenai aset, modal disetor dan kemampuannya menangani permasalahan lumpur Lapindo. Jangan sampai perusahaan yang membeli Lapindo ini perusahaan yang tidak jelas keberadaannya," tambahnya.

Edwin menilai langkah Medco menjual Lapindo Brantas disebabkan perseroan ingin menekan kerugian yang dialami akibat permasalahan lumpur Lapindo. Selain itu, menurut dia, ada kesepakatan tertentu dengan Energi Mega Persada agar masalah arbitrase yang dipersoalkan Medco bisa diselesaikan dengan damai.

Pemilik Lapindo terdiri dari Energi Mega Persada yang memiliki 50% saham Lapindo. Sisanya 32% dimiliki Medco dan 18% lagi dimiliki Santos Brantas.

Sementara itu, Kabiro Penilaian Keuangan Sektor Riil Bapepam Nurhaida mengakui bahwa pihaknya baru saja menerima surat penjelasan dari Medco mengenai penjualan Lapindo tersebut. "Kami masih menelaah surat Medco tersebut," katanya. (Miol/Ant/E-3)

72

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN : 23 .											TAHUN 2007																																		

Konpis Minta KBC Tidak Dibayar

JAKARTA - Komite Nasional Penyelamat Industri Strategis (Konpis) meminta Pemerintah Indonesia tidak membayarkan ganti rugi ke Karaha Bodas Company (KBC), karena KBC telah menerima ganti rugi dari asuransi dari Berry Palmer & Lyle Ltd Loyd's Broker London sebesar US\$ 75 juta. Koordinator Konpis yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (22/3), mengatakan, KBC tidak berhak mendapat ganti rugi karena mereka telah mengelembungkan biaya operasi proyek yang merugikan negara sebesar US\$ 43,1 juta. Di sisi lain, menurut Marwan, KBC juga dinilai telah memanipulasi pajak dan tidak membayar akumulasi pajak sejak 1998 dengan nilai Rp38 miliar. Selain itu, KBC mengelembungkan harga jual listrik dari US\$ 71,58 per MWh menjadi US\$ 72,98 MWh sehingga negara dirugikan US\$ 77,263 juta. (c94)

73

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 13										TAHUN 2007	

Bumi, local govts may buy stake in Newmont

Claire Leow
Bloomberg/Jakarta

PT Bumi Resources, Indonesia's largest coal exporter, has joined with two local administrations in a plan to buy a 3 percent stake in the Batu Hijau copper mine from Newmont Mining Corp. for US\$109 million, an executive said.

Bumi Resources, based in Jakarta, the West Nusa Tenggara provincial government and Sumbawa district may buy the stake in PT Newmont Nusa Tenggara, which runs the mine, Bumi Finance Director Eddie Soebari said Wednesday.

Batu Hijau is the only productive mine in the Southeast Asian nation for Newmont Mining, world's second-largest gold producer.

The stake sale is expected as part of a divestment schedule mandated by Indonesian law to place a greater share of Newmont Nusa Tenggara in the hands of local investors.

The Bumi-led stake sale, if it happened, would reduce

Newmont Mining's share of Newmont Nusa Tenggara to 42 percent from 45 percent, Newmont spokesman Kasan Mulyono said Thursday.

Newmont holds the shares through two local units, Newmont Indonesia Ltd. and Nusa Tenggara Mining Corp.

"The 3 percent share divestment has not been finalized," Mulyono said.

Sumbawa Barat, where the mine is located, is about 1,120 kilometers east of the capital, Jakarta. Batu Hijau is forecast to produce 210 million to 230 million pounds of copper this year, and 230,000 to 250,000 ounces of gold, Newmont said on Feb. 23.

Newmont, based in Denver, will invest about \$140 million in the mine this year, it said.

Sumitomo Metal Mining Corp., Japan's second-largest copper smelter, would maintain a 35 percent stake in Newmont Nusa Tenggara, while a local investor, who bought shares in a first round of divestment, would retain 20 percent.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA				<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI.			<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 5												TAHUN 2007																		

KORUPSI VLCC

Kejaksaan Akan Klarifikasi KPPU

JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Agung akan meminta keterangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus penjualan dua kapal tanker raksasa (*very large crude carrier/VLCC*) Pertamina tahun 2004 lalu.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji, Kamis.

"Nanti dari KPPU dipanggil sebagai saksi," ucapnya. Namun Hendarman tidak menyebutkan kepastian kapan pemanggilan saksi dari KPPU tersebut.

Ditanya tentang status mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi yang diperiksa untuk kedua kali

Rabu (21/3) lalu, Hendarman mengatakan, mantan Komisaris Utama Pertamina itu masih sebagai pihak yang akan dimintai keterangan. "Nanti kalau ada tambahan (perkembangan --Red), akan kita periksa lagi," kata JAM Pidsus.

Kasus tersebut berawal dari pembelian dua kapal tanker VLCC Pertamina pada 2002 seharga 65 juta dolar AS. Namun, pada 2004 BUMN itu menjual keduanya dengan harga 184 juta dolar AS.

Pada tahun 2005, KPPU membawa kasus tersebut ke pengadilan dan memutuskan Pertamina telah merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas karena menjual

dengan harga lebih rendah dari harga pasaran sebesar 102 juta dolar AS per unit.

Kasus penjualan dua unit tanker oleh PT Pertamina itu awalnya diselidiki oleh KPK sejak 2004, namun sampai saat ini kasus itu belum juga ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Namun pada rapat kerja dengan Komisi III pada 22 Januari lalu, lembaga yang dipimpin Taufiequrrachman Ruki itu belum berhasil membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut. Alasannya, KPK belum memperoleh harga pasar, atau pembandingan yang wajar dari kapal tanker VLCC.

Selain belum bisa membuktikan kerugian negara, KPK juga belum dapat

membuktikan adanya unsur memperkaya diri sendiri yang dilakukan Laksamana Sukardi dalam kasus penjualan tanker tersebut.

Belakangan, Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan hukum baik perdata maupun pidana, sehubungan dengan kasus penjualan dua unit kapal tanker raksasa oleh PT Pertamina.

Sebab, sebagaimana rekomendasi Pansus Penjualan Tanker DPR, terungkap bahwa masih ada celah untuk mengembalikan kerugian negara. Ini disebabkan pemenang tender pembelian tanker itu, Frontline Limited, masih belum menyelesaikan pembayaran 13 juta dolar AS.

(Jimmy Radjah)

75

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23	24 25 26 27 28 29 30 31								
HALA HIAN : 13											TAHUN 2007

High-powered Korean delegation to visit RI

The Jakarta Post
Jakarta

A high-powered South Korean delegation will meet Indonesian government and business representatives next month to follow up on an economic cooperation pact signed last December, an official from South Korea's Commerce Ministry says.

"Unlike the last meeting, which only involved talks, we will have signed an agreement on various strategic projects by then (next month's visit)," a

deputy minister from the South Korean Commerce Ministry, Kim Jungwan, said Thursday.

The delegation will consist of a number of government officials and close to one hundred top Korean entrepreneurs.

On Dec. 4, South Korean President Roh Moo-hyun, accompanied by a group of entrepreneurs, and Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono signed a joint declaration in Jakarta on the creation of an extensive strategic partnership.

"Later on in late April, with the task force we have estab-

lished to carry out our plans, we will determine which projects South Korea will take part in," Kim said.

Under the December deal, South Korea will establish business partnerships in seven sectors — policy support; trade, investment and technology; the forestry and marine industries; energy and natural resources; infrastructure and construction; information technology; and the defense sector, with the last four sectors being the main focuses.

The task force, which is answerable directly to Presi-

dent Roh, is made up of representatives of the South Korean Commerce Ministry and the private sector, led by the Korean Chamber of Commerce and Industry.

"I'm personally amazed that South Korea has already established a task force, while the (Indonesian) government has yet to do its part," said Jongkie D. Sugiarto, the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin)'s Korea Committee chairman.

Indonesia is South Korea's No. 1 trading partner in Southeast Asian and the 10th

in the world, with bilateral trade valued at US\$13.7 billion in 2006.

Meanwhile, Indonesia is South Korea's fourth biggest investment destination, with a total of \$4.77 billion having been invested here, giving employment to 500,000 workers.

"Despite the unstable investment climate here, South Korea still regards Indonesia as among the best countries to invest in," Kim said, adding that resource-rich Indonesia helped Korea cope with its lack of energy and natural resources. (06)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2007

TIGA KASUS INSIDER TRADING BELUM TUNTAS Bos Bapepam Belum Mau Komentari

Kasus *insider trading* di dunia pasar modal di Indonesia sering terjadi. Belakangan, Perusahaan Gas Negara (PT PGN) jadi sorotan karena ditengarai melakukan *insider trading*. Namun sebelumnya, tiga perusahaan, swasta dan pelat merah, juga diduga melakukan praktek yang sama. Tuntaskah?

DALAM catatan anggota Komisi VI DPR yang membidangi perusahaan negara, Idealisman Dachy, sedikitnya ada tiga perusahaan yang diduga melakukan praktek *insider trading* sebelum kasus yang sama menimpa Perusahaan Gas Negara (PGN). Ketiga perusahaan itu, dua di antaranya perusahaan pelat merah. Yaitu, PT Semen Gresik (1998) dan PT Indosat (2002). Sedangkan satu lagi adalah perusahaan swasta, Bank Central Asia (BCA) (2001).

Hingga kini, penyelesaian ketiga kasus dugaan *insider trading* itu belum juga ada titik terang. Dachy khawatir, ketidakpastian hukum di dunia pasar modal, akan membuat sejumlah perusahaan swasta maupun BUMN akan terus dihantui perasaan waswas. Semestinya, dia bilang, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai badan yang punya otoritas mengatur lalu lintas pasar modal, harus bisa menyelesaikan setiap kasus yang terjadi.

Sayang, saat *Rakyat Merdeka* mengkonfirmasi tentang penyelesaian kasus dugaan *insider trading* di perusahaan swasta maupun pe-

merintah tersebut, Bos Bapepam Fuad Rahmany tidak menjawabnya. Kendati demikian, dari keempat kasus dugaan *insider trading* tersebut, Fuad Rahmany baru 'kebagian' satu kasus, yaitu PGN.

Menurut Dachy, kasus *insider trading* di dunia pasar modal merupakan tantangan bagi Bapepam untuk menyelesaikannya. Sudah kerap terjadi, namun belum ada satu pun yang diungkapkan secara gamblang.

"Kami minta Bapepam untuk mengungkap kembali kasus *insider trading* yang sudah terjadi, baik itu pada 1998, 2001, 2002 dan 2007," tegas Dachy kepada *Rakyat Merdeka* di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Bapepam, kata Dachy, jangan cuma bisa menduga saja, tanpa bisa membuktikan ke publik, di mana terjadinya *insider trading* dalam hal goreng-meng goreng saham yang berujung pada kerugian negara itu. Pasalnya, kata dia, asus *insider trading*, merupakan bentuk kejahatan yang sulit dibuktikan.

"Sudah sepatutnya Bapepam menunjukkan ke publik perihal kebenaran kasus *insider trading*, karena



Idealisman Dachi

Foto: ZIK/RM

sejak era Ary Suta, Yusuf Anwar dan Darmin Nasution sebagai ketua Bapepam tidak satu pun yang mampu mengungkap kasus tersebut, walau sempat menjadi topik hangat di publik," terangnya.

Harus Diungkap

Sedangkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Andi Rahmat mengungkapkan, kasus *insider trading* memang sulit diungkap. Namun, bagaimana pun, kata dia, Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal harus mengungkap kasus dugaan *insider trading*, baik kasus lama maupun baru. "Dengan begitu, kepastian hukum bisa terwujud bagi semua perusahaan di Indonesia," tandasnya.

Sikap pesimis dalam pengungkap-

pan kasus dugaan *insider trading* pernah dilontarkan Laksamana Sukardi sewaktu menjabat sebagai menteri BUMN di era Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, kasus *insider trading* terbilang kasus sumir, ada kepentingan dagang dan hukum dan agak abu-abu. Apalagi *insider trading* banyak terjadi di Indonesia. Hanya saja, kadarnya yang tidak terlalu besar.

Kasus dugaan *insider trading* yang teranyar terjadi pada PGN pada Januari lalu. Dugaan ini mencuat atas laporan Biro Transaksi Lembaga Efek (TLE) Bapepam-LK yang dikirim ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP), yang mana ditemukan adanya dugaan *insider trading* dalam kasus PGN. Namun pembuktian *insider trading* itu sendiri belum ada titik terang. ■ FIK

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2007

BAP Eddie Diterima Tanpa Status

JAKARTA (SINDO) – Kejaksaan Agung (Kejagung), kemarin, resmi menerima berkas acara pidana (BAP) dan tersangka kasus dugaan korupsi PLTGU Borang, Palembang, Direktur Utama (Dirut) PLN Eddie Widiono.

Kendati demikian, Kejagung belum menetapkan BAP kasus tersebut P-21 (lengkap). "Belum semua petunjuk jaksa dipenuhi oleh pihak penyidik Polri. Tetapi karena lebih dari 14 hari sejak berkas ini diserahkan ke Kejagung, maka penyidikan dinyatakan selesai dan kita terima berkas serta tersangka tanpa status," kata Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji di Jakarta, kemarin.

Hendarman menjelaskan, pihak Polri memang telah meminta keterangan dari General Manager (GM) Magnum Power Jhon David McDonald sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, jaksa penyidik masih mempelajari materi pemeriksaan pria berkebangsaan Australia tersebut oleh polisi. "Keterangan dari McDonald memang ada, tetapi apakah materinya sesuai atau tidak dengan petunjuk jaksa

itu yang masih belum diketahui," jelasnya.

Hendarman menegaskan, dengan diterimanya berkas dan tersangka, kewenangan atas kasus Eddie sepenuhnya ada pada Kejagung. Namun, dia tidak memberikan kepastian kapan kasus itu dilimpahkan ke tahap penuntutan. "Kewenangan kasus tersebut sepenuhnya ada pada Kejagung. Mengenai pelimpahan berkas ke pengadilan, kita lihat dulu, apakah memang sudah memenuhi persyaratan atau tidak," tegasnya.

Soal tidak ditahannya Eddie Widiono, Hendarman menyatakan tidak ada alasan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHP) untuk menahan Eddie Widiono. Apalagi, kata dia, saat Eddie Widiono diserahkan ke Kejagung tidak dalam tahanan. "Jadi, untuk apa kita melakukan penahanan," tukasnya.

Direktur Ekonomi Khusus (Direksus) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Wenny Waro menyatakan, penyerahan BAP Eddie Widiono ke Kejagung dilakukan setelah Polri memperoleh keterangan David McDo-

nald, yang menjadi rekanan PLN dalam pengadaan proyek PLTGU Borang. Menurut dia, Polri meminta keterangan David McDonald atas bantuan Federal Police Australia.

Dari keterangan David, Polri mendapatkan bukti baru, di antaranya David McDonald hanya broker, bukan penyalur resmi mesin yang dibutuhkan PLTGU Borang. Selain itu, kapabilitas izin perusahaan McDonald hanya sampai 2003. "Ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan," ujarnya. Sementara pembangunan PLTGU Borang dilakukan pada 2004.

Pengacara Eddie Widiono, Maqdir Ismail, membenarkan BAP kliennya diserahkan ke Kejagung. Mengenai penahanan, kata dia, tergantung keputusan Kejagung. "Secara administratif, perkaranya sudah diserahkan penyidik ke Kejagung," ujarnya.

Kendati begitu, Maqdir menjelaskan bahwa berkas kliennya belum P-21, kejaksaan sedang mempelajarinya. "Kita tunggu saja bagaimana keputusan kejaksaan," singkatnya. Dia menambahkan, kliennya siap ditahan bila nanti dinyatakan bersalah.



SINDOJAZZ INDIRA

DATANGI KEJAGUNG: Dirut PLN Eddie Widiono, dengan pengawalan ketat polisi, keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Eddie sebelumnya memenuhi panggilan Mabes Polri terkait penyerahan dugaan kasus korupsi PLTGU Borang ke Kejagung, kemarin.

Di tempat terpisah, ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudy Satrio mengaku heran dengan keputusan Kejagung menerima berkas dan tersangka tanpa ada kejelasan status. Menurut dia, bila ada penyerahan berkas dan tersangka dari penyidik Polri, itu artinya BAP sebuah kasus telah dinyatakan P-21. "Kecuali kalau penyidik hanya menyerahkan berkasnya saja, pihak JPU bisa mengatakan kasus itu belum P-21. Ini kan berkas dan tersangka telah diserahkan," katanya.

Sebelumnya, Eddie diduga melakukan *mark up* dalam kasus PLTGU Borong, Palembang, Sumsel. Diperkirakan, kasus ini telah merugikan negara Rp122 miliar.

Selain Eddie, polisi juga menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus tersebut, Direktur Pembangkit Energi Primer Ali Herman Ibrahim, Deputi Direktur Pembangkit Energi Primer Agus Darnadi, dan rekaian PLN Direktur Utama PT Guna Cipta Mandiri Johannes Kennedy Aritonang. (suwarno/mohammad yamin)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 5		TAHUN 2007

Dialog Lapindo tak Temukan Kata Akhir

Ganti rugi *cash and carry* tetap diserahkan kepada PT Lapindo.

SURABAYA—Berlangsung alot, pertemuan Menteri ESDM dengan Timnas, Pansus Lapindo, DPRD Jatim, dan warga korban lumpur di Grahadi kemarin tak menghasilkan kata akhir. Belum ada keputusan tentang ganti rugi *cash and carry* yang dituntut warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS).

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan mendukung tuntutan *cash and carry*. Hanya saja akan menyampaikan tuntutan warga ke PT Lapindo. Sebelumnya sempat terjadi kesepakatan ganti rugi *cash and carry*. Namun warga menolak karena ganti rugi yang disebutkan hanya Rp 15 juta per KK. Kepada wartawan Purnomo mengatakan besaran ganti rugi itu diserahkan ke Bakornas.

"Jika nantinya pihak Lapindo setuju dengan sistem ganti rugi *cash and carry* pemerintah akan segera melakukan verifikasi di lapangan."

Dalam pertemuan kemarin, juga ditentukan batas wilayah yang mendapatkan ganti rugi pascameledaknya pipa Pertamina beberapa waktu lalu. "Ada dua kecamatan yang mendapatkan ganti rugi. Yaitu Kecamatan Gempol dan Porong," kata Purnomo. Di dua kecamatan tersebut, tercatat sebanyak 8 ribu rumah serta sekitar 30 hektare sawah yang mendapatkan

ganti rugi.

Pertemuan dihadiri Menteri ESDM, Menteri LH Rachmat Witoelar, Menteri PU Joko Kirmanto yang menyusul datang kemudian, Gubernur Jatim, Pansus DPRD Jatim serta perwakilan warga korban lumpur terdiri atas 11 orang, lima dari Perum TAS I, dua Renokenongo, dua Kali Tengah dan dua dari Kedungbendo. Tampak juga Kepala BIN Syamsir Siregar.

Pertemuan dibayangi unjuk rasa korban lumpur. Kehadiran mereka di luar gedung Grahadi dijaga ketat pasukan keamanan dengan barikade dan bahkan mobil *water cannon*.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan warga yang ikut dalam pertemuan juga menyalakan kehadiran Kepala BIN, Syamsir Siregar yang ikut dalam pertemuan. "Apa kapasitasnya dia ikut pertemuan. Soal ganti rugi kan tidak ada hubungannya dengan kewenangan dia," ujar Mujiono, salah satu perwakilan warga yang ikut dalam pertemuan.

Mujiono juga menyatakan, karena tidak ada kepastian ganti rugi, pada akhir Maret nanti sekitar 15 ribu warga Perum TAS I akan *ngeluruk*, Jakarta guna mendesak Presiden RI. "Kita berangkat dua gelombang. Gelombang pertama konvoi naik sepeda motor dan kedua naik kereta api," katanya.

Sebelumnya, di tengah berjalannya dialog, Sekretaris Pansus Lapindo M Mirdasy tiba-tiba keluar dan menyatakan ketidakpuasannya pada dialog di Grahadi sore. Mirdasy memutuskan untuk pulang, karena menilai dialog

ini tidak akan menghasilkan *out put* yang memuaskan. Ia menilai Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro yang hadir dalam dialog ini lebih berperan sebagai pengarah Timnas ketimbang putusan Presiden.

PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang ditunjuk Lapindo Brantas Inc untuk membeli lahan warga korban semburan lumpur, menyatakan siap membeli tanah warga. "Kami siap membeli lahan milik warga, baik yang bersertifikat, petok D maupun letter C, asalkan ada surat jaminan dari bupati (Sidoarjo, Win Hendrarso)," ujar Vice President PT Minarak, Andi Darussalam, di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, surat jaminan dari bupati dimaksudkan untuk menegaskan persil yang tercantum dan tanah yang dimaksud tidak sedang dalam sengketa, sehingga ganti rugi akan tepat sasaran. "Kalau sudah ada bukti kepemilikan tanah atau surat jaminan dari bupati, maka ganti rugi akan kami berikan secara bertahap dengan 20 persen diberikan pada tahap pertama," tegasnya.

Sebaliknya Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, menyatakan bahwa dirinya tidak bisa serta merta memberikan jaminan tanah petok D dan letter C yang terendam lumpur Lapindo. Namun, harus menunggu 'payung' hukumnya terlebih dulu.

"Nanti kita berkoordinasi dulu dengan tingkat atas (pemerintah pusat). Pasalnya, pertanahan merupakan masalah spesifik yang kewenangannya berada di pemerintah pusat secara struktural, baik dari tingkat Kabupaten hingga pusat," ucapnya. ■ edo

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA			<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS			<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI			<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM					
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23	24 25 26 27 28 29 30 31							
HALAMAN : 3										TAHUN 2007	

KORUPSI PLN

Berkas Perkara Eddie Widiono Diserahkan ke Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono, Kamis (22/3), datang ke Kejaksaan Agung, dikawal beberapa polisi berseragam dan berpakaian safari. Ia datang untuk memenuhi ketentuan administrasi penyerahan berkas dan tersangka perkara dugaan korupsi dalam pembelian dua mesin turbin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Borang. Dalam kasus yang diduga merugikan

negara sekitar Rp 120 miliar itu, Eddie ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2006. Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji, Kamis malam, mengatakan, Kejagung belum menyatakan berkas Eddie itu lengkap. Namun, polisi sudah melengkapi pemeriksaan dengan keterangan General Manager PT Magnum Power John David McDonald seperti diminta jaksa.

"Yang dilakukan sekarang, menerima berkas dan tersangka tanpa status," tutur Hendarman. Jaksa juga sedang meneliti apakah pemeriksaan John David McDonald sudah memenuhi materi yang dibutuhkan dalam perkara itu. Kejaksaan pun berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan perkara ini. Eddie saat meninggalkan Kejagung hanya berkata, "Saya akan

kembali bekerja." Pengacara Eddie, Maqdir Ismail, mengakui, secara administrasi perkara itu sudah diserahkan penyidik ke kejaksaan. "Kita tunggu hasilnya saja," katanya. Direktur II Perbankan dan Ekonomi Khusus Polri Brigjen Wenny Warouw mengakui, ada keterangan dari Kepolisian Nasional Australia bahwa McDonald hanyalah broker, bukan pengusaha yang bonafide. (IDR/SF)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23	24 25 26 27 28 29 30 31						

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

Lapindo Siap Beli Lahan Warga Tak Bersertifikat

SURABAYA – Manajemen PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), perusahaan yang ditunjuk Lapindo Brantas Inc membeli lahan warga korban semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, menyatakan siap membeli tanah warga yang tak bersertifikat.

"Kami siap membeli lahan milik warga, baik yang bersertifikat, petok D maupun letter C, asalkan ada surat jaminan dari Bupati Sidoarjo Win Hendrarso," ujar Wakil Presiden Minarak Andi Darussalam Tabussala di Hotel Shangri La Surabaya, Kamis (22/3).

Menurut dia, surat jaminan dari bupati dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tanah yang dimaksud tidak sedang dalam sengketa, sehingga ganti rugi akan tepat sasaran.

"Kalau sudah ada bukti kepemilikan tanah atau surat jaminan dari bupati, maka ganti rugi akan kami berikan secara bertahap dengan 20% diberikan pada tahap pertama," jelas dia.

Sebelumnya, warga korban lumpur Lapindo menyatakan protes karena pihak Lapindo beritikad tidak membayar lahan pekarangan maupun ladang pertanian yang tidak bersertifikat atau hanya memiliki petok D atau letter C.

Lapindo pada awalnya juga berkukuh yang menerima ganti rugi secara tunai (*cash and carry*) warga di empat desa, yaitu Renokenongo, Jatirejo, Siring dan Kedungbendo hanya tanah yang bersertifikat.

Sesuai kesepakatan warga empat desa dengan Lapindo yang difasilitasi oleh Bupati Sidoarjo Win Hendarso, sawah warga korban lumpur diganti Rp 120 ribu per m², tanah pekarangan Rp 1 juta per m² dan bangunan Rp 1,5 juta per m².

"Kini kami siap membayar uang muka 20% kepada warga, tidak hanya yang bersertifikat saja, yang petok D maupun letter C juga akan kami bayar, asalkan ada jaminan dari Pak Bupati," jelas dia.

Surat jaminan Bupati juga menjadi solusi bagi tanah dan bangunan yang bersertifikat tapi bukan atas nama sendiri. Selain itu, tanah dan bangunan itu harus dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Surat Keterangan Ahli Waris. "Ini untuk membuktikan tanah yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam sengketa," tambah Andi.

Cash and Carry

Sementara itu, Pemerintah melalui Ketua Tim Pengarah Timnas Lumpur Lapindo Purnomo Yusgiantoro akan memperjuangkan *cash and carry* untuk tanah dan bangunan dengan lingkup batasan khusus pasca-ledakan pipa gas Pertamina 22 November 2006 lalu.

"Tuntutan *cash and carry* akan

diperjuangkan agar Lapindo bisa memenuhi. Untuk itu perlu adanya verifikasi untuk validitas. Pemerintah akan secepatnya memberikan jawaban. Besok, Gubernur Jatim akan bawa data verifikasi untuk perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) ataupun yang lain," katanya usai pertemuan dengan Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo di Gedung Grahadi Kamis (22/3).

Purnomo mengatakan, meski usai pertemuan hasilnya masih seperti pertemuan dengan Lapindo, pemerintah akan memperjuangkan agar lapindo bersedia memberikan ganti rugi *cash and carry*.

Dalam pengajuan *cash and carry* ke Lapindo, ada beberapa data tambahan unit rumah dan tanah yang sudah disepakati tim verifikasi dengan Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Win Hendarso menjelaskan, tambahan unit rumah dan luasan tanah yang diperjuangkan untuk mendapatkan *cash and carry*, di antaranya di wilayah Kecamatan Tanggulangin, desa Kedungbendo, perumahan TAS

6.500 unit rumah, non TAS RT 07-15 sebanyak 768 unit rumah, desa Ketapang 76 unit rumah dan 8 ha sawah, desa Gempolasri 73 unit rumah dan sawah 13,8 ha, desa Kalitengah 30 unit rumah dan 8.849 m².

"Untuk Kecamatan Porong, akan kita identifikasi dan verifikasi lagi. Desa Reno Kenongo sudah hampir total tergenang. Yang belum masuk RT 1-8, RT 10-15. Kurang lebih tambahan 800 unit rumah yang akan diverifikasi," jelas dia.

Dibentuk Badan Umum

Sebelumnya, usai membuka seminar Mekanisme Pengadaan Tenaga Listrik di Jakarta, kemarin, Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk badan umum, seperti Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) di Aceh, guna menggantikan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Timnas Lumpur) yang nasibnya tinggal sepekan lagi.

Ia menjelaskan, badan umum memiliki anggaran pendanaan (budget), sehingga akan memper-

mudah akses pendanaan penanggulangan lumpur. Berbeda dengan Timnas yang selama ini tidak memiliki mekanisme anggaran.

"Tidak mungkin Timnas lagi, karena ini sifatnya hanya koordinasi, saya misalnya *nggak* bisa akses langsung ke Departemen Pekerjaan Umum (PU), harus ke Menteri PU, demikian juga kalau ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tapi, kalau badan umum itu bisa, karena punya budget, BRR misalnya punya budget sendiri di Bappenas, saya minta ada badan ini," ujarnya.

Purnomo menuturkan, dengan dibentuknya badan umum yang berimplikasi pada kemudahan pendanaan, diharapkan pengeboran relief well (RW) bisa kembali dilakukan.

Hingga saat ini pengeboran RW 3 tidak bisa dilakukan karena terkendala pendanaan. "Terustarang kalau sekarang dananya *nggak* ada. *We need budget*. Bisa saja dananya dari PT Pertamina (Persero) atau dari BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi), masuk ang-

garan mereka, itu belum pernah terjadi. masalahnya siapa yang mau bayar," tegasnya.

Bentuk Pansus

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita berjanji segera membentuk Pansus Lapindo guna menyelesaikan persoalan ganti rugi warga yang sampai saat ini belum juga tuntas.

"Prinsipnya, DPD Jatim sepenuhnya mendukung tuntutan dan aspirasi masyarakat korban lumpur Lapindo yang dikuatkan dengan keputusan pansus DPRD Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah untuk merealisasikan pembayaran ganti rugi *cash and carry* atau secara tunai," ujarnya menjawab wartawan di gedung DPD Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).

Menurut Ginandjar, pihaknya berharap pemerintah segera menalangi biaya ganti rugi, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang diakibatkan semburan lumpur panas tanpa menghilangkan kewajiban PT Lapindo Brantas. (ros/zal/ari/ref)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

Bapepam Harus Kritis terhadap Tindakan Medco

Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) harus bersikap tegas terhadap rekayasa keuangan yang dilakukan dalam peralihan kepemilikan saham di Lapindo Brantas Inc.

Oleh
SIGIT WIBOWO

Perlakuan yang sama harus diberikan terhadap PT Medco Energi International Tbk yang ingin melarikan diri dari tanggung jawab dengan tindakan tersebut.

"Bapepam tidak boleh plin-plan atau menerapkan standar ganda terhadap perusahaan yang sama-sama *go public*," kata analis pasar Modal Edwin Sinaga di Jakarta Kamis (22/3).

Hal itu ditegaskan terkait dengan pernyataan Sekretaris Perusahaan Medco Energy Andy Karamoy bahwa PT Medco Energy Internasional Tbk menjual seluruh kepemilikan sahamnya sebanyak 32 persen (Medco Brantas) di Lapindo Brantas Inc kepada Grup Prakarsa senilai US\$ 100 (sekitar Rp 920.000,00). Transaksi tersebut dilakukan pada 16 Maret 2007. Namun tidak dijelaskan apakah Grup Prakarsa masih terkait Medco atau tidak.

Jika tindakan-tindakan seperti ini dibiarkan, tidak hanya reputasi Bapepam yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitasnya semakin merosot di tengah-tengah tumpukan berbagai skandal pasar modal yang belum

terselesaikan. Bapepam akan ikut menanggung kesalahan jika sampai suatu saat tidak ada penyelesaian dalam luapan lumpur lapindo Brantas.

Ia meminta Bapepam konsisten dan melakukan penyelidikan apakah transaksi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kepentingan masyarakat luas yang harus diutamakan terutama kurban lumpur panas Lapindo di Sidoarjo.

Analisis Independen Yanuar Rizky meminta masyarakat mewaspadaai berbagai upaya pemilik Lapindo Brantas terutama kelompok Bakrie dan Medco yang berupaya melakukan rekayasa keuangan. "Pemerintah harus bertindak tegas sehingga pemilik Lapindo tetap harus perusahaan *go publik* sehingga pertanggungjawaban akan bisa di pantau," kata Yanuar. Jika kepemilikan Lapindo dikuasai oleh perusahaan tertutup maka pertanggungjawaban keuangan terhadap kurban juga tidak jelas.

Menurutnya, skenario buruk yang bisa terjadi, yakni seluruh kepemilikan Lapindo Brantas Inc nantinya di tangan perusahaan Bakrie yang bernama Minarak Labuan Co Ltd. Setelah itu uang ganti rugi untuk para korban

lumpur panas tersebut diambilkan dari sumber yang tidak jelas. "Uang yang berasal dari sumber tidak jelas ini mungkin saja akan digunakan dan pada akhirnya negara yang dirugikan," tandasnya.

Lapor ke BEJ

Andi lebih lanjut mengatakan pihaknya sudah menyampaikan laporan penjualan tersebut ke Bapepam dan Bursa Efek Jakarta. Ketika ditanya apakah dengan penjualan tersebut proses gugatan arbitrase yang dilayangkan Medco kepada Lapindo batal, Andi juga menolak menjelaskannya. Dengan penjualan tersebut, seluruh kepemilikan Medco di blok Brantas telah dilepas ke Grup Prakarsa.

Sumber SH menyatakan Grup Prakarsa merupakan salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan Minarak Labuan Co Ltd, anak perusahaan Grup Bakrie yang bermarkas di Malaysia. Penjualan tersebut dilakukan agar biaya penanggulangan luapan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak membebani keuangan Medco.

Sementara itu, Pemda Kabupaten Pasuruan menyiapkan lahan 60 hektare untuk relokasi pabrik-pabrik korban lumpur di Porong, Sidoarjo. Lahan khusus tersebut diharapkan menjadi *cluster* baru bagi pendirian pabrik-pabrik relokasi korban lumpur. (chusunun hadi)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 81

TAHUN 2007

6 BUMN diminta setor dividen 50%

Oleh M. MUNIR HAIKAL & WISNU WIJAYA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kementerian BUMN meminta enam badan usaha milik negara menyetorkan dividen 50% dari laba bersih yang dibukukan tahun lalu.

Keenam BUMN itu adalah PT Pertamina, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Semen Gresik Tbk.

Sekretaris Meneg BUMN Muhammad Said Didu mengatakan pemerintah sebagai pemegang saham meminta dividen 50% tersebut karena mereka dinilai membukukan kinerja yang bagus tahun lalu.

"Bagi BUMN yang menjadi perusahaan terbuka, pemberian dividen 50% kepada pemegang saham merupakan janji yang tertuang dalam prospektus ketika *go public*," tuturnya kemarin.

Berdasarkan data prognosis 2006, kelima perusahaan pelat merah itu merupakan penyumbang laba terbesar tahun lalu di mana Pertamina masih menjadi kontributor laba terbesar Rp23,33 triliun, disusul Telkom Rp10,5 triliun, dan BRI sekitar Rp4,2 triliun.

BUMN penyumbang laba terbesar lainnya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja, dan PT Jamsostek. (*Lihat tabel*)

Namun, tutur Said, Kementerian BUMN tidak meminta besaran dividen yang sama kepada badan usaha milik negara lainnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak krisis ekonomi hingga 2003, pemerintah secara rata meminta setoran dividen 50% dari seluruh laba

10 BUMN penyumbang laba terbesar 2006 & 2005 (Rp miliar)		
	2006	2005
Pertamina	23.326	16.456,84
Telkom	10.500	7.993,57
BRI	4.205	3.808,59
BNI	2.000	1.414,74
PGN	1.565,84	862,01
Bank Mandiri	2.421,4	603,4
Semen Gresik	1.320	1.022,57
Aneka Tambang	1.558,75	841,94
Pupuk Sriwidjaja	920	702,19
Jamsostek	774,55	629,62

Sumber: Kementerian BUMN, indikasi dari perseroan, Bloomberg.
Keterangan: Sebagian laba 2006 merupakan prognosa

bersih BUMN.

Pada 2004, Kementerian BUMN hanya meminta dividen 50% dari laba bersih mayoritas jumlah BUMN yang totalnya 158 perusahaan. Permintaan dividen separuh dari laba bersih itu terus berkurang pada 2005 hingga menjadi hanya lima BUMN tahun lalu dari 139 perse-roan.

Pasalnya, BUMN merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka memerlukan belanja modal untuk membiayai investasinya. Dua tahun lalu, total investasi dari BUMN Rp40 triliun, naik menjadi Rp70 triliun tahun lalu.

Berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan 2007, total investasi BUMN meningkat lagi menjadi Rp114 triliun.

Guna mengawasi realisasi belanja modal, Said menambahkan seluruh BUMN diwajibkan melaporkan pengucuran belanja modal setiap bulan.

Chief Economist PT CIMB GK Kahlil Rowter mengatakan permintaan dividen yang berlebihan secara jangka panjang akan menggerus ekuitas perseroan. "Kalau dividen diminta terus dalam jumlah yang besar, kapasitas perseroan membelanjakan modalnya akan terbatas yang kemudian berdampak pada kemampuan menghasilkan laba," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan kinerja bank-bank pemerintah saat ini membutuhkan tambahan modal untuk memperbaiki performanya di tahun buku selanjutnya. "Idealnya, dividen tahun ini 25%-30%. Bagi kami, kebutuhan kapital saat ini sangat penting," ujarnya. (*Bisnis*, 17 Oktober 2006)

Menurut dia, *payout ratio* 50% bagi bank pemerintah menyebabkan lambannya bank BUMN memperkuat kapasitas kapitalnya untuk menyejajarkan diri dengan bank berskala internasional. (*munir.haikal@bisnis.co.id/wisnu.wijaya@bisnis.co.id*)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 81

TAHUN 2007

Konsorsium Bumi Resources ambil 3% saham Batu Hijau Rp995 miliar

Oleh PUDJI LESTARI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Bumi Resources Tbk bersama dengan dua pemerintah daerah mengambil alih 3% saham pertambangan tembaga Batu Hijau dari Newmont Mining Corp seharga US\$109 juta atau setara Rp995,17 miliar (US\$1=Rp9.130).

Direktur Keuangan Bumi Eddie Junianto Soebari mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah tingkat II Sumba membentuk konsorsium untuk kemudian menjadi perseroan terbatas guna mengelo-

la Batu Hijau.

Eddie menolak merinci berapa besar andil perusahaan pertambangan batu bara itu dalam pembelian saham Batu Hijau. Namun, menurut dia, perseroan akan mencari pendanaan guna membiayai pembelian saham tambang itu.

"Pendanaannya nanti bisa internal bisa pihak ketiga. Apapun bentuknya, kami akan *arrange financing* [mengatur pembiayaan]," tuturnya kepada *Bisnis*, kemarin tanpa merinci lebih lanjut kapan hal itu bakal direalisasikan. Adapun penandatanganan transaksi, kata Eddie, telah dilangsungkan pada pekan lalu.

Penjualan saham ini merupakan bagian dari jadwal divestasi yang dimandatkan oleh peraturan untuk mengalihkan sejumlah besar saham Newmont kepada para investor lokal.

Juru bicara Newmont Kasan Mulyono, seperti dikutip *Bloomberg*, mengatakan dengan adanya transaksi tersebut, maka saham Newmont di Newmont Nusa Tenggara akan berkurang menjadi 42% dari semula 45%.

Newmont memiliki saham di dua unit usahanya Newmont Indonesia Ltd dan Nusa Tenggara Mining Corp.

Eddie mengungkapkan dalam kesepakatan yang dibuat

oleh Bumi dan kedua pemda, perseroan akan memegang porsi mayoritas dalam pengelolaan Batu Hijau. Namun, dia menolak merinci lebih lanjut soal pembagian tersebut.

Menurut dia, langkah Bumi membeli saham Batu Hijau sudah sejalan dengan visi perseroan. "Kami selalu ingin berekspansi pada bidang sumber daya energi dan sumber daya yang berbasis mineral. Jadi ini masih *in-line*."

Pada 23 Februari, Newmont memproyeksikan pada tahun ini Batu Hijau bisa memproduksi sekitar 210 juta-230 juta *pound* tembaga dan 230.000-250.000 *ounce* emas.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13.

TAHUN 2007

PILAR

Warga Perum TAS diberi 2 pilihan

JAKARTA: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan warga Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS) hanya diberikan dua pilihan untuk ganti rugi warga yang rumahnya kebanjiran lumpur panas Lapindo.

Kedua pilihan tersebut adalah *pertama*, Lapindo Brantas Inc hanya mau memberikan kompensasi berupa relokasi plus dana Rp15 juta, atau pilihan *kedua*, yaitu pemerintah yang mengganti dari dana Bakornas sebesar Rp15 juta.

Dia mengatakan baik pemerintah maupun Lapindo tidak dapat membayarkan *cash and carry* seperti yang diminta warga. Hal itu dikarenakan pemerintah tidak dapat memaksa Lapindo membayarkan lebih karena tidak ada keputusan hukum yang menyatakan Lapindo bersalah karena peristiwa pada 22 November 2006.

Pada 22 November 2006 terjadi ledakan pipa gas PT Pertamina akibat terjadinya penurunan tanah yang disebabkan luberan lumpur panas Lapindo.

"Lapindo hanya bersedia relokasi dan Rp15 juta sebagai bentuk *corporate social responsibility*," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Jika pemerintah yang mengganti, besarnya Rp15 juta per kepala keluarga, sama seperti yang diberikan pada korban gempa di Aceh dan Yogyakarta. (BISNIS/09)

85

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 13										TAHUN 2007	

Bapepam-LK Pelajari Penjualan Lapindo

JAKARTA (SINDO) - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sedang menelaah transaksi penjualan kepemilikan saham Lapindo Brantas oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco). Otoritas pasar modal itu berjanji memberikan perlakuan yang sama, baik kepada PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) atau kepada Medco, terkait pelepasan Lapindo Brantas.

"Jika nantinya terdapat perbedaan antara keduanya (EMP dan Medco), kita akan melihat apa yang membedakan dan perbedaan itu akan dijadikan pedoman apakah Medco boleh melepaskan sahamnya atau tidak. Itu yang sedang kita pelajari," kata Kabiro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK Nurhaida di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, secara kasat mata kedua transaksi itu, yakni penjualan yang dilakukan EMP maupun Medco, hampir sama. Namun, untuk memastikannya, Bapepam-LK sedang mempelajari transaksi penjualan terse-

but.

Nurhaida mengungkapkan, Bapepam-LK akan mengklarifikasi beberapa poin kepada Medco, antara lain mengenai proses arbitrase yang saat ini tengah berlangsung dan tanggung jawab Medco atas Lapindo. "Apakah dengan pelepasan ini kewajibannya akan lepas dan menjadi tanggung jawab (pihak) yang baru atau bukan, itu akan kita telaah. Saat ini belum tahu detailnya," kata dia.

Di tempat terpisah, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu transaksi tersebut. "Saya tidak mau berkomentar dulu tentang itu, saya belum dapat informasinya secara lengkap," kata dia.

Seperti diberitakan, Medco telah melepas kepemilikan sahamnya di Lapindo Brantas kepada Grup Prakarsa senilai USD100. Perjanjian jual beli tersebut ditandatangani pada 16 Maret 2007. Selama ini, Medco melalui anak usahanya, Medco Brantas, memiliki saham sebanyak 32%. (nunung ahniar)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31							
HALAMAN : 13											TAHUN 2007

Dua Aksi Korporasi INCO

PERGERAKAN harga saham PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) begitu mengagumkan. Awal Maret (1/3), harga saham penambang nikel ini baru bertengger di kisaran Rp 39.100. Selang tiga minggu kemudian, atau tepatnya hari Selasa lalu (20/3), harga saham INCO sudah nangkring di harga *goban* alias Rp 50.000. Mantap kali, Bung!

Kondisi ini membuat pasar jadi belingsatan ke sana-ke mari. Banyak was-wus menyeruak di pasar seputar emiten tambang ini. Ujung-ujungnya INCO kembali dirubungi "nyamuk rumor".

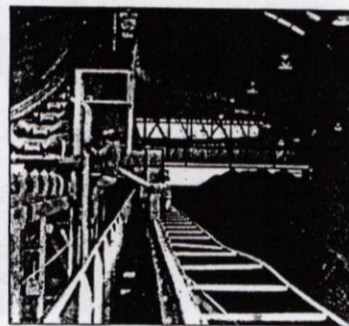
Tidak tanggung-tanggung, ada dua rumor langsung menyengat INCO. Rumor pertama menyebut Inco akan menerbitkan saham baru (*right issue*). Rumor kedua berbunyi, INCO akan memecah nilai sahamnya (*stock split*). "INCO akan *stock split* bila harga sahamnya menembus Rp 57.000 per saham," ujar seorang pialang saham.

Isu semacam ini sempat menerpa INCO beberapa waktu silam. Kala itu, para bandar bersepakat kalau INCO segera melakukan *stock split* jika harganya bertengger di atas Rp 40.000. Ternyata, rumor itu hanya isapan jempol.

Maka, sebagian analis menanggapi isu *stock split* kali ini dengan dingin. Seorang analis bilang, kecil kemungkinan INCO memecah sahamnya. "Kalaupun satu saham dipecah menjadi sepuluh, toh harganya tetap tinggi," ujar si analis.

Pasar jadinya lebih fokus pada isu penerbitan saham baru. "Kalau ini memang besar kemungkinannya," ujar seorang analis. INCO memang lagi butuh banyak modal untuk membangun dua pabrik pengolahan nikel baru, di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dan di Bahodopi, Sulawesi Tengah, yang seluruhnya butuh dana sekitar US\$ 1 miliar.

"Ah, namanya juga rumor, buat apa dipercaya?" komentar Indra Ginting, Sekretaris Perusahaan



Dok.KONTAN

Inco, mengomentari rumor itu.

Indra malah tertawa geli mendengar rumor *right issue*. "Tahun lalu kinerja kami bagus, jadi kami belum perlu melakukan *right issue*," tangkisnya.

Tahun 2006, INCO memang berhasil membukukan laba bersih yang amat tinggi, yakni US\$ 513,4 juta. Kalau kita rupiahkan dengan kurs Rp 9.200 per dolar, nilainya mencapai Rp 4,723 triliun.

Markus Sumartomdjon

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT **23** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 88

TAHUN 2007

Medco agar jelaskan penjualan blok Brantas

Oleh ARIF GUNAWAN S.
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan memanggil PT Medco Energi Internasional Tbk untuk meminta klarifikasi soal penjualan hak kepemilikannya di PT Medco E&P Brantas kepada Grup Prakarsa.

Otoritas pasar modal itu berjanji memberi perlakuan sama (*equal treatment*) dalam menilai transaksi tersebut, seperti proses penilaian transaksi penjualan Lapindo Brantas oleh PT Energi Mega Persada Tbk.

Medco Brantas merupakan pemegang 32% hak kepemilikan (*working interest*) Blok Brantas Sidoarjo, yang sedang dilanda banjir lumpur panas.

Lapindo Brantas Inc selaku operator mendominasi hak kepemilikan sebesar 50%, sedangkan Santos (Brantas) Pty Ltd dari Australia memiliki 18% sisanya.

Ketua Bapepam-LK A. Fuad Rahmany mengatakan pihaknya untuk sementara belum melihat benturan kepentingan dalam transaksi penjualan senilai US\$100 tersebut.

Penjualan tersebut dihitung berbeda dari penjualan Lapindo Brantas Inc milik Energi Mega kepada Freehold Group Limited (FGL) yang batal beberapa waktu lalu.

"Transaksi itu lain [dari EMP]. Medco Brantas kan bukan grup Bakrie, yang dijual ke grup Bakrie. Kalau dulu, [penjualan Lapindo Brantas oleh EMP] kan ada benturan kepentingan. Tapi kami masih mempelajari dulu," tuturnya kepada pers, kemarin.

Terlibat transaksi

Meski demikian, lanjut dia, klarifikasi masih akan dilakukan. Pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Medco, selanjutnya Biro Penilaian Keuangan Perusahaan (PKP) Sektor Riil akan memanggil beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi itu terutama manajemen Medco dan pemilik Prakarsa.

Pemanggilan dilakukan untuk melihat ada-tidaknya benturan kepentingan, keterkaitan transaksi dengan arbitrase yang berjalan, serta terhadap pertanggungjawaban penanggulangan bencana dan dampak lumpur panas Sidoarjo.

"Ya, pasti akan kami panggil. Bu Nurhaida [Kabiro PKP Sektor Riil] akan memanggil," ujarnya.

Secara terpisah, Nurhaida mengatakan dalam menilai transaksi Medco tersebut pihaknya akan memberikan perlakuan sama seperti ketika menilai penjualan Lapindo kepada Freehold.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

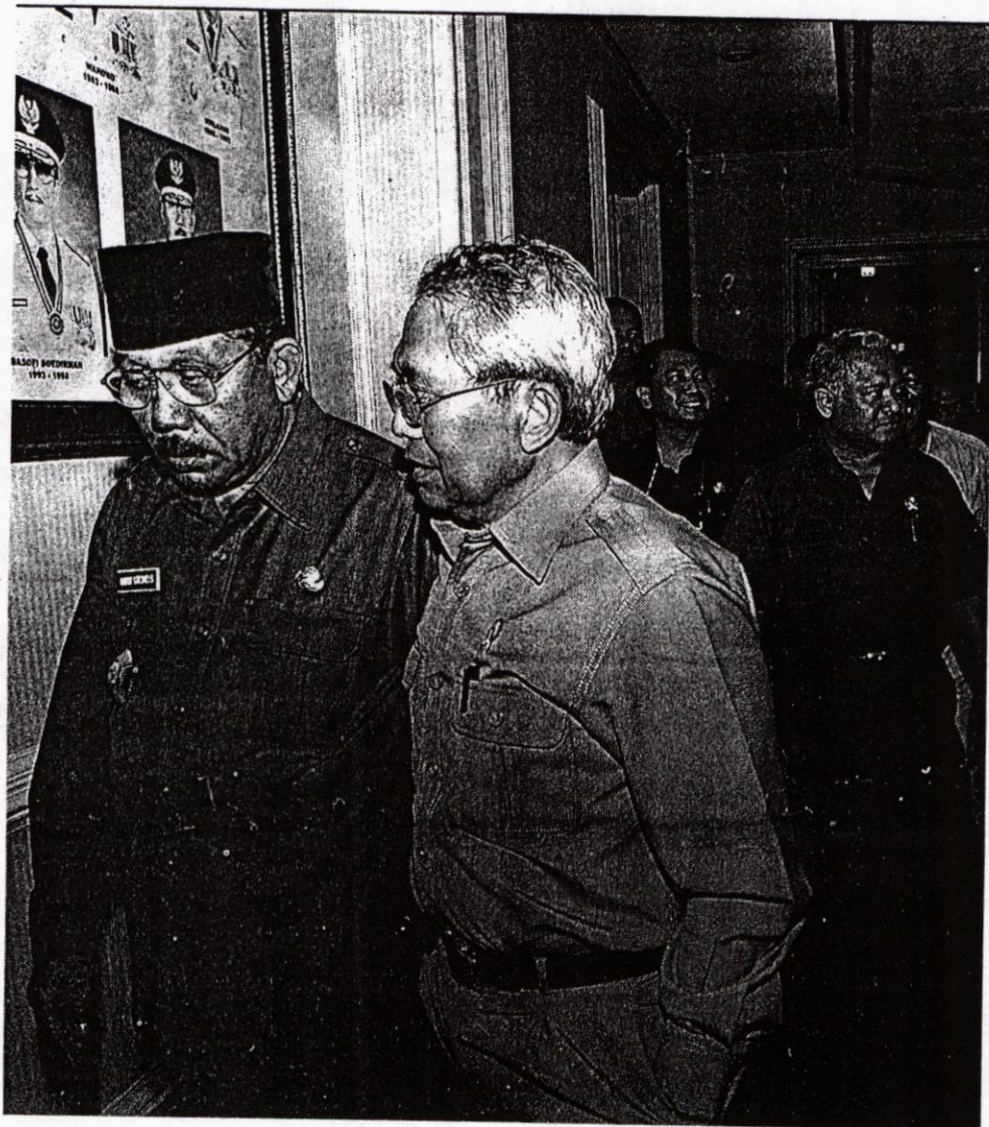
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **23** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007



BISNISWAHYU DARMAWAN

BAHAS KORBAN LUMPUR: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (*kedua kiri*) berdialog sambil berjalan dengan Gubernur Jatim Imam Utomo, diikuti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro (*kanan*), usai rapat tertutup membahas tuntutan ganti rugi *cash and carry* warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc, di Surabaya, tadi malam.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 7										TAHUN 2007	

LUMPUR SIDOARJO

Ganti Rugi Mengacu pada Analisis Hukum

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memastikan penyelesaian masalah luapan lumpur di Porong, Sidoarjo harus mengacu pada analisa hukum dari kepolisian, termasuk persoalan ganti ruginya. Sebab, setelah ledakan pipa gas pada 22 November 2006 lalu pihak Polda Jatim menyatakan tidak sepenuhnya kesalahan Lapindo.

Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro usai membuka seminar "Mekanisme Pengadaan Pembangkit Tenaga Listrik" di Departemen ESDM, Jakarta, Kamis (22/3). "Ini yang berbicara aparat hukum, karena subduksi (penurunan — Red) tanah. Kita menyadari dan kita memahami aspirasi masyarakat minta

cash and carry tapi Lapindo sampai saat ini hanya bersedia relokasi plus," kata Purnomo.

Menurut Purnomo, pemerintah telah berusaha keras untuk mendorong penyelesaian ganti rugi sebaik-baiknya, namun Lapindo punya alasan hukum untuk menyatakan relokasi plus melalui pemberian sekian bidang tanah dan rumah serta uang Rp 15 juta per keluarga. "Jadi kita gunakan analisa hukum. Kalau dihitung-hitung jumlah ganti rugi yang sebelum ledakan pipa 22 November jumlahnya dua kali dibandingkan relokasi plus. Silahkan berargumen, tapi ujung-ujungnya merujuk kepada keputusan aparat hukum," ujarnya.

Purnomo menjelaskan, yang dita-

warkan Lapindo yakni pemberian dana sewa selama 2 tahun dan selama kurun waktu itu dibangun rumah sambil menunggu relokasi plus uang. "Tapi memang kita akui itu lebih kecil dari yang kemarin," ujarnya.

Purnomo juga mengatakan, tim nasional Penanganan Lumpur Sidoarjo tidak mungkin dibentuk lagi. Pasalnya tim itu dinilai tidak memadai untuk menangani luapan lumpur yang telah menenggelamkan ribuan rumah.

Diakuinya, bentuk tim nasional hanya bisa bersifat koordinasi dan tidak punya wewenang untuk lintas sektoral. Padahal luapan itu berpengaruh pada beberapa sektor seperti lingkungan hidup, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. (Abdul Choir)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN : II											TAHUN 2007																																		

Laba PGAS Tumbuh 17 Persen

DIREKTUR Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), Sutikno mengatakan, laba bersih perseroan mengalami peningkatan rata-rata sekitar 17% per tahun dalam lima tahun terakhir. "Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2002 karena adanya gain dari penjualan anak perusahaan," kata Sutikno, di Jakarta, kemarin. Sementara kenaikan pada 2005 disebabkan adanya peningkatan volume dan penyesuaian harga jual serta keuntungan dari selisih kurs, katanya.

Laba bersih perseroan pada 2005 silam mencapai Rp 862 triliun, sementara pada kuartal III 2005 mencapai Rp 427 triliun. Sedangkan laba bersih pada kuartal III 2006 mencapai Rp 1,565 triliun. Untuk pendapatan tercatat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20% dalam lima tahun terakhir.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume transmisi dan distribusi serta kenaikan harga jual. Kenaikan yang signifikan terjadi pada 2004 sebesar Rp 4,458 triliun dan 2005 sebesar Rp 5,434 triliun yang disebabkan telah beroperasinya secara penuh jaringan pipa transmisi jalur Grissik-Singapura. • Imq

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 **(23)** 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2007

Sidang Paripurna DPD Setujui Bentuk Pansus Lapindo

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lapindo terkait masih berlarutnya penyelesaian masalah luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Keputusan pembentukan Pansus diambil dalam Sidang Paripurna ke-10 Penutupan Masa Persidangan III DPD di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (22/3), yang bermula ketika anggota DPD asal Jawa Timur Mujib Imron melakukan interupsi agar DPD segera membentuk Pansus Lapindo. Dalam pernyataan sikapnya, Mujib yang mewakili seluruh anggota DPD dari Jawa Timur menyatakan keprihatinannya atas nasib yang menimpa masyarakat Sidoarjo.

"Kami mendesak pemerintah mengambil alih masalah ini dan Lapindo juga harus tetap bertanggung jawab," ujarnya.

Masalah dari mana sumber dana untuk membayar ganti rugi, Mujib menyarankan dana tersebut bisa diambil dari dana cadangan bencana alam yang dimiliki pemerintah. Mujib menambahkan, Pansus Lapindo merupakan bentuk pertanggungjawaban DPD atas masalah lumpur Sidoarjo. "Ini adalah saatnya bagi DPD untuk mendapatkan tempat di masyarakat," katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, pimpinan Panitia Ad Hoc II (PAH II) DPD, Jum Perkasa menyatakan PAH II DPD menyetujui untuk membentuk Pansus Lapindo DPD. "PAH II DPD mendukung usulan pembentukan Pansus Lapindo," katanya ketika menyampaikan sikap PAH II DPD.

Menindaklanjuti keputusan PAH II DPD yang mendukung pembentukan Pansus Lapindo tersebut, Ketua DPD Ginandjar Kartasmita sebagai pimpinan sidang langsung mengetuk palu tanda pembentukan pansus disetujui forum sidang paripurna. (M Kardeni)